

**TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN
KEAGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR**

SKRIPSI

Oleh
HANZAH ADI PRAYOGO
NIM. C04217015



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANZAH ADI PRAYOGO
NIM : C04217015
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqih Siyāṣah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Menyatakan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2021

Saya Yang Menyatakan



Hanzah Adi Prayogo
C04217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanzah Adi Prayogo, NIM: C04217015 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 15 Mei 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arif Wijaya', with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending upwards from the middle of the signature.

Arif Wijaya, S.H.,M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Hanzah Adi Prayogo NIM: C04217015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munas Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada hari Rabu, 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah

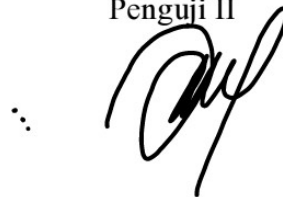
Majelis Munas Skripsi

Penguji I



Arif Wijaya S.H., M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji II



Dr. Syamsuri, M.HI
NIP.197210292005011004

Penguji III



Sukanto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV




Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, Juli 2021

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HANZAH ADI PRAYOGO
NIM : C04217015
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : hanzahadi9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Penulis

(Hanzah Adi Prayogo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan mengenai Tinjauan Yuridis dan juga persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan Masyarakat dalam Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Tentang pembatasan kegiatan keagamaan masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan kajian Siyasah Dusturiyah.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan pembatasan kegiatan keagamaan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020, adalah respon juga terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dalam berbicara keagamaan tidak lepas dengan instrumen hukum HAM, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dalam pasal 28 E ayat 1. pembatasan dimaksud adalah secara forum eksternal yaitu dalam hanya tata cara pelaksanaan ibadahnya bukan untuk membatasi secara mutlak. Dalam kebijakan ini dikeluarkan oleh menteri negara yang dalam konsep Siyasah Dusturiyah disebut Wizarah/Wazir (pembantu khalifah), kebijakan pembatasan diterbitkan melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kemudian diperjelas dalam pedoman pembatasan di Permenkes nomor 9 tahun 2020, secara konsep siyasah dusturiyah menteri negara termasuk *Wazir Al-Tafwidh* yang tugasnya sebagai pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan kenegaraan dan pemerintahan, sehingga kebijakan menteri negara dalam pembatasan kegiatan keagamaan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan wewenang *Wazir Al-Tafwidh*.

Penulis memberikan saran bahwa dalam kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan perlu diberikan sosialisasi terhadap masyarakat, pemahaman yang mengartikan bahwa dilarang beribadah merupakan kesalahan, bahwa pada kebijakan menteri negara ini hanya mengatur tata cara beribadahnya bukan melarang secara mutlak. Dan perlunya diperjelas sanksi juga dalam pelanggaran kebijakan tersebut karena masih belum disebutkan sanksi bagi pelanggar, dan perlu diperhatikan dalam sanksinya agar tidak terasa merugikan para pihak dalam beribadah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| G. Kegunaan Hasil Penelitian | 13 |
| H. Definisi Operasional | 14 |
| I. Metode Penelitian..... | 15 |
| J. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP <i>WIZARAH</i> | |
| <i>AL-TAFWIDH</i>..... | 20 |
| A. Pengertian Fiqh Siyasah | 20 |
| B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah | 22 |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah yang kini menjadi pandemi di seluruh dunia yang dikenal dengan nama virus Corona (Covid-19) yang telah melanda dunia dan memberi berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, keagamaan. Benar adanya wabah adalah hanya sebuah penyakit, namun ia bukan penyakit biasa tetapi ia justru mampu meluluhlantakan berbagai sektor kehidupan manusia sekaligus mengubah pola dan cara hidup manusia saat ini. Melihat pengertian wabah sendiri menurut perundang-undangan, yakni undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular “wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”¹

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara termasuk Indonesia dengan kurun waktu beberapa bulan.² Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia lainnya hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk mengurangi transmisi penyebaran virus yang

¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

² Merry Dame Cristy Pane, “*Virus Corona*”, dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona/>, (diakses pada 21 November 2020 11:56)

Dalam kondisi yang seperti ini kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi poin utama yang harus di dahulukan, setiap orang berhak atas kesehatan ini bukanlah hanya sebuah semboyan atau kata-kata indah yang tertempel pada setiap sudut tempat pelayanan kesehatan, namun ini adalah suatu tanggung jawab yang di emban oleh Negara dan harus diberikan pemenuhannya secara prima bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, karena seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan semikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran HAM.⁴

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁴Idah Rosida, “*Setiap Orang Berhak Sehat*”, dalam <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/>, (diakses 21 November 2020 13.33)

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 H Ayat 1 Bab Hak Asasi Manusia

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 H Ayat 1 Bab Hak Asasi Manusia

Ancaman keselamatan publik dari penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat membuat pemerintah mau tidak mau harus memberikan kebijakan yang terbaru terkait ancaman kesehatan akibat dari virus Covid-19, dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-undang ini terkait karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan Hal ini yang dimaksud kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan /atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.⁶ Dan dalam hal pelaksanaan pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan karantina kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu

[illegible]

teratur beberapa kegiatan masyarakat yang mengalami pembatasan frekuensi dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bunyi pasal 4 ayat 1:⁷

“Pembatasan Sosial Berskala Besar Paling sedikit meliputi: a.) tempat ibadah dan tempat kerja, b.) pembatasan kegiatan keagamaan; dan c.) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat dalam menghadapi pandemi tersebut akibat dari virus Corona ini telah menetapkan pembatasan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Kepres tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang oleh karenanya pemerintah juga

Pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat dan aktivitas tersebut akibat dari virus Corona ini telah menetapkan peraturan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Kepres tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang oleh karenanya pemerintah juga telah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat.

ang Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan
a pandemi Covid-19 yang oleh karenanya pemerintah juga
maka lebih banyak lagi yang harus dilakukan untuk melindungi

Pandemi yang muncul di tahun ini juga tidak luput dengan di p
besar Islam terkait Shalat Idul Fitri sendiri Majelis Ulama Indon

aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tobroni, “ *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*”, (Jember, 2020)

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan doa-doa massal dan kegiatan keagamaan lainnya di mushola ataupun masjid sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi warga Negara, akan tetapi dalam hal kegiatan adat atau keagamaan kegiatan-kegiatan doa massal di masjid ataupun tempat lain di tengah pandemi covid-19 dibatasi dan dikurangi imbas juga terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya oleh menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar. Kita tidak menginginkan bahwa kerumunan doa-doa massal justru malah menjadi penyebab claster baru penularan wabah covid-19.

⁹Intan Utami, Dody Ertanto, “*Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19*”, Vol.5 No.2 (Agustus, 2020), hlm.137-138

¹⁰ Andry Novalino, “*Pedoman PSBB, Seluruh Tempat Ibadah Ditutup*”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200405082605-20-940403/pedoman-tempat-ibadah-ditutup>, (diakses pada 14 Desember 2020 14.35)

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Pada hadis pertama jika dikaitkan dengan konteks sekarang ini, Covid-19 uzur syar'i. Dengan demikian yang berhalangan shalat jumat karena dampak Covid-19 menggantikannya dengan shalat duhur empat rakaat di rumah.

¹²Ibid., hlm.10

Berangkat dari penjelasan di atas, dimana merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yakni terkait pembatasan kegiatan keagamaan, apakah dalam hal ini pemerintah memberikan larangan dalam beribadah selama pandemi, dalam peraturan menteri kesehatan yang dimuatkan peraturan tersebut mengatur terkait pedoman pembatasan selama pandemi, apakah sudah tepat adanya peraturan ini atau malah akan memicu permasalahan baru, terkait keputusan dalam peraturan pembatasan kegiatan keagamaan yang termaktub dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 bagaimana pandangan Siyash Dusturiyah dalam hal ini.

B. Identifikasi Masalah

[illegible]

- ## Keputusan No.9 Tahun 2020

uridis terhadap Pembatasan Kegiatan Kea

- ap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan
 or 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial
 Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam
 ehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman
 kala Besar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan Masyarakat dalam Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹³

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika Pembatasan Kegiatan Keagamaan di masa Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

¹³Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hlm.8

1. *“Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”* Jurnal ini ditulis oleh Abdul Syatar, UIN Alauddin Makassar. Muhammad Majdy Amiruddin, IAIN Parepare, Arif Rahman, UIN Alauddin. Jurnal ini menjelaskan tentang pemahaman menjadi moderasi dalam beragama pada masa pandemi Covid-19 menjadi sebuah keharusan. Sedangkan dalam penulisan skripsi penulis membahas terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal kebijakan peraturan pembatasan kegiatan keagamaan umat beragama selama keadaan pandemi.
2. *“Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada kegiatan keagamaan dan Pendidikan”* Jurnal ini ditulis oleh Mukhran H. Usman, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Dan Andi Wahyu Irawan, Universitas Mulawarman. Dalam jurnal ini menjelaskan masalah yang besar ketika manusia berada dalam kondisi alam berupa merebaknya wabah Covid-19 atau bencana lainnya. Yang dimana membolehkan bagi umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan selama keberadaan dan masuhnya penyebaran wabah. Pada penulisan skripsi penulis sedikit ada persamaan yakni dimana dalam pembahasan lebih diutamakan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan dalam beribadah selama pandemi namun berbeda dengan objek kajiannya yang mana objek kajian penulis adalah dalam kebijakan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan sosial berskala besar.

3. *Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19*” Jurnal ini ditulis oleh Intan Utami, Dosen IAIN Bengkulu. Dody Ertanto, Dosen UNIVED Bengkulu. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menertibkan Peraturan Fisikal Distensing atau Lockdown yang berakibat juga adanya pembatasan kegiatan terlebih lagi pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta pelarangan adanya mudik, untuk memutus mata rantai Virus Covid-19. Dalam penulisan skripsi penulis lebih membahas kepada pembatasan kegiatan keagamaan dalam beribadahnya dalam objek kajian Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020, sedikit persamaan dalam tradisi ramadhan atau lebaharan hanya digunakan sebagai contoh kecil fakta dilapangan terkait imbas kebijakan pembatasan.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut memberikan penjelasan yang arah penulisan penulis kali ini, dimana penulis lebih pro dengan kebijakan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang didalamnya mengatur pembatasan kegiatan keagamaan yang nantinya akan memberikan penjelasan terkait peraturan tersebut bahwa peraturan ini diterbitkan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat selama pandemi tanpa memberikan beban baru atau masalah baru di lingkup masyarakat.

- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangah ilmu dan pikiran terkait pembatasan kegiatan keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pembatasan Kegiatan Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau

aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undang terkait kebijakan tersebut.¹⁴

Tahap-tahap seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19
- c. Teori *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyasah Dustūriyah* dan *Wizārah (Wazir Tafwidhiyah)*.
- d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan terkait Pembatasan Kegiatan Keagamaan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁵ Sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

¹⁴Abdul kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.34

- 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014
 - 4) Undang-Undang No.36 Tahun 2009
 - 5) Undang-undang No. 6 Tahun 2018
 - 6) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020
 - 7) Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018
 - 8) Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020
 - 9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020
 - 10) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020.
 - 11) Fatwah Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2016
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti litelatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, dll.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagai penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan metode deskriptif analitik dengan pola deduktif penjelasan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Adapun terkait data yang di analisis ini adalah mengenai kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan dalam Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang di lihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang nantinya dengan pola deduktif memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum berdasarkan hasil analisis itu kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyasah Dustūriyah* dan *Wazir Tafwidhiyah*.

Bab III data penelitian, memuat Data Penjelasan penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Bab IV Analisis data memuat pembahasan analisis terhadap pembatasan kegiatan keagamaan dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diakhiri dengan penyampaian saran.

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH*

Kata *fiqh* sendiri berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* secara bahasa pengertian kata *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia terhadap Syari'at Islam. Imam al-turmudzi seperti dikutip Amir Syafiuddin menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya hingga kepada kedalamannya.¹⁶

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-arab adalah mengatur atau memimpin, sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah

¹⁸ Ibid, hlm.27

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintah Islam. Bersamaan dengan Khalifah Islam dan pemerintah yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *Wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *Wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum

[illegible]

langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.³⁴

untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.³⁶

terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.³⁸

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika Khalifah tidak begitu berkuasa lagi Wazir-Wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga Khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan Khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir Al-Umar'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi ke khalifahan dari keluarga Abbasiyyah. Meskipun Khalifah sudah lemah dan tidak berdaya, padahal kesempatan dan kemampuan untuk merebut kekuasaan mereka memiliki. Barangkali pandangan para Sunni tentang *Al-Aimma min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi Khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan Khalifah.³⁹

³⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah....*, hlm.32

³⁹ Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Hlm.77

3. Tugas dan wewenang *Wazir Tafwidh*

Disini wazir tafwidh tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir tafwidh dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.⁴² Akan tetapi maksudnya bahwa wazir tafwidh disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja artinya wazir Tafwidh boleh melakukan semua aktivitas secara umum.

⁴² Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara.....*, hlm.59.

Setelah diketahui tugas dan *Wazir Tafwidh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *Wazir Tafwidh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu : *Pertama*, Imam berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait penataan yang dilakukan otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua*, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran,

[illegible]

Wazir disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasar pikiran dan ijtihad para Wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan Wazir kecuali tiga hal yaitu:⁴⁵

- a. Mengangkat seorang pengganti, seorang Imam diperbolehkan mengangkat penggantian sesuai yang ia kehendaknya, tetapi *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- c. Seseorang Imam diperbolehkan mencatat pejabat yang dilantik oleh *Wazir Tafwidh* akan tetapi *Wazir Tafwidh* tidak punya hak untuk mencatat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

Selain ketiga kewenangan diatas penyeraha mandat Imam kepada *Wazir Tafwidh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *Wazir Tafwidh*, padahal *Wazir Tafwidh* telah

⁴⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*...., hlm.47

Kementerian Negara

penyelenggaraan pemerintahan dan kepala negara menjadi sangat penting. Suatu kementerian terdapat kementerian tersebut sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, kementerian adalah perangkat pemerintah yang melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan, selanjutnya terdapat kementerian adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, kementerian adalah perangkat pemerintah yang melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan, selanjutnya terdapat kementerian adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan.

Setiap menteri membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan, urusan-urusan tersebut dalam pasal 4 ayat (2) undnag-undang nomor 39 tahun 2008

⁴⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

memeluk suatu agama sesuai yang ia yakini. Ketentuan kebebasan beragama juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini seolah memperjelas bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Selain kedua pasal diatas, jaminan terhadap kebebasan beragama juga ditemukan pada ketentuan pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap penduduk dalam rangka memeluk agama dan menjalankan ritual atau peribadatan sesuai ajaran agama yang diyakininya. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa negara memberikan jaminan tidak hanya terhadap hak memilih dan memeluk agama, tetapi juga jaminan terhadap kebebasan untuk menjalankan kegiatan peribadatan sesuai ajaran, anjuran, dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan agama yang diyakini.⁴⁸

Terkait kebebasan tersebut tidak diberikan secara mutlak tapi juga disertai dengan rambu-rambu pembatasannya, UUD NRI 1945 melalui ketentuan pasal 28 J, memberikan rambu-rambu pembatas terhadap kebebasan beragama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

⁴⁸ Muwaffiq Jufri, “*Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan, Th.1. No.1, (Juni 2016). Hlm 44.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan ini, hak yang diberikan terhadap kebebasan beragama tentunya dapat juga dibatasi dengan alasan agar tidak mengganggu dan mengurangi hak yang dimiliki orang lain, memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai, moral, dan agama yang dianut. Juga mempertimbangkan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat juga ditemui di pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Ketentuan pada undang-undang ini menambahkan bahwa pertimbangan kesehatan bisa menjadi alasan untuk membatasi hak dan kebebasan beragama. Dengan artian bahwa ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama tersebut tidak hanya karena bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain, mengacaukan keamanan dan ketertiban umum, tetapi bisa juga karena alasan kesehatan.

menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan – pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan pada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan.

D. Asas dan Tujuan Karantina Kesehatan

Karantina merupakan pembatasan aktifitas seseorang yang menderita penyakit menular sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi, walaupun belum memperhatikan adanya satu gejala apapun, atau berada pada masa inkubasi, tempat kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi oleh barang ataupun orang yang menjadi sumber dari penyakit menular tersebut, hal ini mencegah penyebaran wabah penyakit.

Pemberlakuan karantina kesehatan di wilayah diatur pada BAB VII Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa apabila terdapat suatu wabah penyakit dan melakukan suatu tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada kondisi darurat kesehatan maka perlu dilakukan karantina. Dalam melakukan karantina sebagaimana yang dimaksudkan diatas haruslah mempertimbangkan besarnya ancaman wabah. Karantina wilayah merupakan respon dari kedaruratan masyarakat karena suatu wabah penyakit menular yang mana pelaksanaannya diberlakukan kepada anggota

9. Kedaulatan negara

Selain dari pada itu penyelenggara Karantina Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 3 Bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal penyakit dan/untuk faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

E. Prosedur Permohonan dan Penetapan PSBB

Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana telah diberitakan dalam Permenkes terbitkan aturan Pedoman PSBB Penanganan COVID-19. Permenkes ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. PSBB adalah

Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵³

- Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).⁵⁴

Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasar permohonan Gubernur/Bupati/Walikota, dalam mengajukan permohonan Gubernur/Bupati/Walikota harus menyertakan data:⁵⁵

- ⁵² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

⁵³ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

⁵⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020..., hlm.16

⁵⁵ Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (1-4) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan kemudian menetapkan PSBB untuk wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.⁵⁸

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN
KEGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR

Pada babak baru ini selepas pengumuman ada warga negara yang terjangkit virus Covid-19 pemerintah menghimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *Panic Buying*. Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden, berkaitan dengan langkah itu pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang mana Gugus Tugas ini dipimpin oleh kepala BNPB Doni Monardo. Kemudian dalam bidang kesehatan strategi juga segera diambil oleh pemerintah dengan menambah rumah sakit rujukan menjadi 132 Rumah Sakit Pemerintah, 109 Rumah Sakit TNI, 53 Rumah Sakit Polri, dan 65 Rumah Sakit BUMN.⁶²

52

Melihat kondisi yang seperti ini banyaknya korban virus Covid-19 Direktur Jederal Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Preside Joko Widodo, dimana isi dari surat tersebut adalah supaya pemerintah Indonesia meningkatkan tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi Darurat Kesehatan. Dari sini pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengkampanyekan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) demi mencegah penularan virus Corona.

Seiring dengan bertambahnya korban sejak diumumkannya pasien positif Covid-19 hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan masukan untuk diadakannya Karantina Wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19, mengapa demikian dikhawatirkan apabila masyarakat masih diberi keleluasaan berpergian akan menjadi awal penyebaran semakin luas dan layanan kesehatan nantinya bisa mengalami kelumpuhan jika arus wabah Covid meledak secara meluas.

Melihat kondisi yang semakin rumit dan keadaan yang tetap harus mengutamakan kesehatan warga negara Indonesia, dengan berbagai pertimbangan Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Langkah ini diambil Pemerintah dengan Tujuan mampu memutus penyebaran mata rantai penularan Virus Covi-19 dengan perhatian yang diutamakan

adalah kesehatan warga Negara, sesuai dengan yang diucapkan Presiden Joko Widodo pada Telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 31 Maret 2020 “dimana inti dari kebijakan ini kita sangat jelas dan tegas, pertama Kesehatan masyarakat adalah yang paling utama. Kendalikan penyebaran virus Covid-19 dan mengobati yang terjangkit”.

Dalam upaya melindungi warga dari resiko penularan virus Covid-19, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang di singkat dengan PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.⁶³ Berkenaan dengan Pemerintah Daerah yang ingin memberlakukan PSBB harus memiliki ijin persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan apabila mendapat izin tersebut mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ada beberapa poin yang mana kegiatan-kegiatan masyarakat harus dilakukan pembatasan kegiatan meliputi:

⁶³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan.
- c. Pembatasan kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum.
- d. Pembatasan kegiatan soisal dan budaya.
- e. Pembatasan mode transportasi.
- f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Tentunya kita paham dengan kondisi yang seperti ini dimana wabah penyakit menular ini merugikan banyak sektor terutama imbas dari dampak penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas selain perusahaan, perkantoran, perindustrian juga merasakan dampak yang sangat besar pada pandemi tahun ini. Dari hal terbesar hingga hal terkecilpun tak luput oleh imbas dari pandemi ini, tentunya dalam kondisi yang seperti ini yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan masyarakat karena jika memang ingin memberikan kemajuan atau perubahan tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul sehingga faktor kesehatan juga menjadi faktor utama untuk mencapai hal tersebut. Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial beskala besar salah satunya yang menjadi titik pembahasan kali ini penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan pembatasan kegiatan keagamaan.

Dalam analisis penulis terkait polemik yang timbul, pembahasan Pembatasan kegiatan kegamaan tentunya adalah salah satu norma yang diatur dalam beberapa instrumen hukum HAM. Mengulas mengenai pembatasan kegiatan keagamaan

sepertinya tidak afdol atau tidak lepas dari dua konsep kebebasan beragama, yang dimaksud dua konsep ini adalah kebebasan dalam forum internal dan kebebasan dalam forum eksternal. Kebebasan dalam forum internal berbicara mengenai kebebasan bagi setiap individu atau kelompok untuk memeluk agama atau kepercayaan yang mana itu tidak bisa di intervensi maupun dibatasi oleh Negara, hak ini bersifat mutlak bagi penganutnya. Sedangkan untuk kebebasan dalam forum eksternal yakni mencakup kebebasan bagi setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya, melakukan penyebaran agamanya, menyampaikan pendidikan agama, melaksanakan komunikasi urusan agaman.⁶⁴ Dalam beragama tentunya pasti ada waktu dimana seorang harus memenuhi kewajibannya yang dalam artian adalah beribadah atau kegiatan-kegiatan doa yang menjadi tradisi atau kewajiban pada pemeluk agamanya, setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau kepercayaannya begitu juga dalam hal beribadah konsekwensi tidak boleh seorangpun mengganggu kebebasan seseorang untuk menganut atau beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Negara wajib mengatur kebebasan dalam melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaannya agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dari sedikit uraian diatas penulis mengartikan pembatasan kegiatan keagamaan bahwa pemerintah bisa memberikan pembatasan dalam lingkup

⁶⁴ Zainal Abidin Bagir et al., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Bekeyakinan*, (Yogyakarta :CRCS, 2019), Hlm. 5-6

Pertimbangan atas pembatasan kegiatan keagamaan dengan tujuan yang ingin dicapai mempunyai hubungan langsung dengan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang mana didalamnya ada lima elemen sebagai berikut: Keselamatan Masyarakat (*Public Savety*), Ketertiban Masyarakat (*Public Order*), Kesehatan Masyarakat (*Public Health*), Etik dan moral Masyarakat (*Morarl Public*), dan Melindungi Hak dan Kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental right and freedom of others*). Secara lebih rinci diuraikan dibawah ini:⁶⁵

⁶⁵ Mulia Siti Musdah, “*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*”, (t.tp.: ELSAM, 2007)

Covid-19 ini dan agar tidak membahayakan kemaslahatan para pemeluknya.

- b. *Restriction of the Protection of Public Order*, (pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat). Pembatasan kebebasan ini untuk memberikan rasa tertib di lingkungan masyarakat dan agar tidak menimbulkan *panic buying*.
- c. *Restriction of the Protection of Public Health*, (pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat). pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pemerintah untuk intervensi kepada masyarakat guna mencegah pandemi ata penyakit menular agar tidak menyebar luas.
- d. *Restriction of the Protection of Moral*, (pembatasan untuk melindungi moral masyarakat). Pembatasan ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai rasa takut dan khawatir terhadap pandemi ini dan agar tidak memaksakan untuk beribadah di kerumunan karena tidak diinginkan kerumunan ibadah tersebut malah menjadi titik balik penyebaran virus ke masyarakat yang lain.
- e. *Restriction for the Protection of the Fundamental Right and Freedom*, pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.

keadaan apapun. Disini peran negara sangat dibutuhkan agar dalam kehidupan beragama tidak terjadi benturan antara penganut agama satu dengan penganut agama lain. Sehingga bisa terwujud kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, damai, dan bersatu.

Dalam kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan ini merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara jelas bahwa muatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Undang-undang tercantum pada bagian kelima pasal 59 ayat 3 yang berbunyi:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: peliburan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan aktifitas perkantoran tempat kerja, dan pembatasan pada kegiatan keagamaan masyarakat, serta pembatasan kegiatan yang di tempat atau fasilitas umum.

Meski dalam konteks beragama hal tersebut merupakan kebebasan warga negara, akan tetapi jika menyikapi Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 respon terhadap undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat dan acaman kesehatan akibat dari virus Corona ini telah menetapkan Kepres kedaruratan Kesehatan. Berbekalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dianggap sekarang Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan karena pandemi Covid-19 yang oleh karenanya

Poin pembatasan hak tersebut termasuk Pembatasan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah menurut penulis merupakan kebijakan yang sudah tepat yang diambil pemerintah dalam menghadapi wabah penularan Covid-19, karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan warga negara, niat kuat untuk melindungi warga negara yang diupayakan pemerintah juga selaras dengan apa yang ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

⁶⁶ Faiq Tobroni, “ *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*”, Vol.6.No.2 (Agustus, 2020)

- Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang
- Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum
- Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah
- Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (memutus rantai penularan).

[illegible]

bahwa konsep ini adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan untuk nama pemimpin, yaitu Khalifah dan Presiden.

Kementerian selaku pemerintah eksekutif dengan adanya kewenangan dari setiap kebijakan tersebut untuk menjalankan urusan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan terkait pembatasan kegiatan keagamaan jika ditinjau berdasarkan kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dengan konsep *Wizarah* tersebut, yang mana hal ini pemerintah telah bertindak sesuai kewenangannya dalam bidang pemerintahan. Sebab, menteri kesehatan dalam urusan pembatasan kegiatan ini merupakan suatu kebijakan yang mana mempertimbangkan terkait tujuan menjaga keselamatan publik akibat dari penyebaran virus Covid-19, yang mana sebelumnya sudah diterbitkan peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sebelumnya diatur di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, yang kemudian di peraturan menteri kesehatan ini nomor 9 tahun 2020 diatur lebih jelas terkait pedoman pembatasan tersebut yang merupakan respon dari aturan yang lebih tinggi sebelumnya. Bisa dilihat bahwa kebijakan dari menteri kesehatan terkait nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan wewenang *Wazir Al-Tafwidh* dimana sebagai tugas pembantu pemerintah yakni memberikan penjelasan atau pedoman terhadap undang-undang sebelumnya.

Dalam analisis penulis Melihat Kebijakan pembatasan ini tentunya pasti ada pro kontra dikalangan masyarakat, dibeberapa tempat mungkin setuju namun

pastinya juga ada reaksi protes, dan juga yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut, reaksi kontra ini terjadi karena wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang belum tersosialisasi dan belum pahamnya terkait peraturan tersebut. Dampaknya pembatasan kegiatan keagamaan yang diterapkan pemerintah tentunya merubah kebiasaan masyarakat dengan tradisi-tradisi doa massal yang mulanya bisa beribadah semaunya dan dimanapun, akibat dari adanya pandemi ini mengakibatkan diberlakukannya pembatasan-pembatasan dalam kegiatan keagamaan tersebut, dampak dalam pembatasan ini bisa kita lihat yang mana waktu itu ditiadakannya sholat jum'at dalam beberapa pekan, kemudian dibatasinya jumlah masyarakat dalam beribadah di masjid ataupun mushola di wilayahnya, dan dibatasinya berkerumun ataupun melakukan doa-doa massal kegiatan keagamaan di masjid secara berkerumun, dan diberlakukannya jaga jarak dalam setiap shaf sholat. Poin dari pembatasan ini bukan serta merta membatasi seseorang untuk dibatasi dalam beribadah bahkan bukan sampai melarang umat beragama untuk beribadah secara mutlak, bukan hal itu yang diharapkan pemerintah, justru dalam kebijakannya terkait pembatasan kegiatan keagamaan ini sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, di Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan tata cara pembatasan kegiatan keagamaan Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”

Maka dari qaidah tersebut kita wajib menghindari kemungkinan-kemungkinan penyebaran virus bisa dibilang kerumunan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dari mudharat atau bahaya, dan seperti kita ketahui Virus Covid-19 merupakan sesuatu yang berbahaya banyak menimbulkan mudharat sehingga harus di jauhi. Keselamat publik

[illegible]

tetap menjadi prioritas sebagai bentuk menjunjung tinggi dan kepatuhan masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

Dengan demikian bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan pembatasan dalam kegiatan masyarakat merupakan solusi yang baik dengan tujuan menjunjung kesehatan masyarakat, adanya peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagai pejelasan yang didalamnya disebutkan bukanlah sebagai bentuk melarang masyarakat secara mutlak untuk melakukan kegiatan melainkan ada batasan-batasan dalam segi pengerjaan kegiatan tersebut. disini dilihat dari teori tugas dan wewenang menteri sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dalam teori *Fiqih Siyasah* sesuai dengan wewenang *Wazir Al-Tafwidh* sebagai pembantu pemimpin atau khalifah.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan yang baik, namun perlunya secara masif disosialisasikan kepada masyarakat dikarenakan banyaknya pro dan kontra. Bahwa adanya peraturan ini bukanlah suatu kerugian dalam mengatur masyarakat beribadah, dan perlunya dipertegas dalam sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini karena masih belum adanya saksi tetap yang di jelaskan pada peraturan tersebut. diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

- Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.1. No.1. Juni, 2016.
- Novalino, Andry, “Pedoman PSBB, Seluruh Tempat Ibadah Ditutup”, dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200405082605-20-940403/pedoman-tempat-ibadah-ditutup> diakses (14 November 2020).
- Pane, Merry Dame Cristy, “Virus Corona”, dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona/>, diakses (21 November 2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.
- Rosida, idah, “Setiap Orang Berhak Sehat”, dalam <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/>, diakses (21 November 2020).
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Rusman, “Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh”, dalam <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-evaluasi-pelaksanaan-psbb-secara-menyeluruh>, (23 Januari 2021).
- Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Pres, . 2011.

- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, “Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (Covid-19)”, *Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13. No.1. Juni, 2020.
- Syafiuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah dan Doktrin Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Tekni Penulisan Penelitian Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Tobroni, Faiq. *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*, Vol. 6. No.2, Agustus, 2020.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 H Ayat 1 Bab Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Utami, Intan, Dody, Ertanto. *Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19*, Vol. 5. No.2. Agustus, 2020.
- Zahra, Muhammad Abu. (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. t.t.